



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi

Revisi
2022



RENCANA STRATEGIS 2020 -2024

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN**

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian telah disusun.

Renstra BBPPMPV Pertanian disusun berdasarkan pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang berpedoman pada Renstra Kemdikbudristek Tahun 2020- 2024. Dalam proses penyusunannya, Renstra BBPPMPV Pertanian menggunakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BBPPMPV Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian tujuan strategis serta mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Renstra BBPPMPV Pertanian Tahun 2020-2024 ini merupakan hasil reviu tahun 2022 menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam Renstra Kemendikbudristek dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Lembaga sebagai penggerak sektor pembangunan pendidikan bidang vokasi yang dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2020 hingga tahun 2024.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Renstra BBPPMPV Pertanian ini.

Cianjur, Agustus 2022 Kepala

Dr. Yusuf S.T., M.T.
NIP. 127209102003121004



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	4
1.2. Potensi dan Permasalahan	12
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	21
2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	23
2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	27
3.2. Kerangka Regulasi	31
3.3. Kerangka Kelembagaan	33
3.4. Reformasi Birokrasi	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
4.1. Target Kinerja	42
4.2. Kerangka Pendanaan.....	43
Lampiran.....	45

BAB I. PENDAHULUAN

“Memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke dalam industri-industri”

Arahan Presiden dalam Percepatan Pembangunan SDM Unggul 2020-2024

Semangat percepatan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul pada fase pemerintahan kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode tahun 2019–2024 menjadi pemantik kekuatan yang efektif baik secara institusional maupun individual. Dalam bingkai kelembagaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui unit pelaksana teknisnya (UPT) di lapangan berusaha untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia sesuai dengan target yang telah direncanakan, diantaranya melalui target capaian kualitas pembelajaran sehingga mampu menghasilkan pelajar Pancasila. Derasnya perubahan yang melintasi babak revolusi industri 4.0 sebagai tonggak peradaban baru yang mengkolaborasi kemampuan teknologi dengan kualitas intelegensia manusia diharapkan dapat melahirkan inovasi dan kreativitas baru. Keselarasan paradigma digital yang harus dimiliki oleh setiap individu saat ini telah memaksa zaman untuk bergerak secara disruptif. Oleh karena itu, salah satu tantangan cukup berat yang dihadapi adalah bagaimana menumbuhkembangkan keadaban baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman tanpa harus melupakan identitas dan budaya luhur Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan berbhineka tunggal ika.

Sebagai salah satu UPT Kemendikbudristek, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian dalam rentang perjalanan programnya terus berkomitmen untuk dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdaya saing. Transisi kewenangan di tingkat pusat telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari Direktorat Jenderal Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), sampai saat ini berada dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (DIKSI) cukup memberikan pengalaman dan kematangan dalam mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas utama BBPPMPV dalam pasal 10 adalah melaksanakan tugas Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan fungsi BBPPMPV adalah sebagai berikut:

(1) Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; (2) Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi; (3) Pelaksanaan penyalarsan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (4) Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi; (5) Pengelolaan data dan informasi; (6) Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; (7) Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan (8) Pelaksanaan urusan administrasi. Secara ringkas kedelapan fungsi kelembangaan tersebut mengarah kepada: (1) penjaminan mutu dan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan bidang vokasi pertanian; dan (2) pembangunan jejaring kemitraan dalam rangka kolaborasi yang luas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi maka BBPPMPV Pertanian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Rujukan yang digunakan untuk menyusun dokumen renstra adalah Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 reuiu 2022. Sementara itu, aktualisasinya diatur dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Unit Kerja Eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon 1. Perubahan OTK di tingkat kementerian berdampak pada adanya restrukturisasi program Renstra Kemdikbud, menjadi periode 2020 dan periode 2021 - 2024. Pada Renstra tahun 2020, menggunakan struktur PPPPTK Pertanian yang menginduk kepada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan/GTK, karena program tahun 2020 sudah berjalan. Renstraperiode 2021-2024 menggunakan struktur program baru, yaitu BBPPMPV Pertanian yang menginduk kepada Dirjen Pendidikan Vokasi.

Sebagai penjabaran dari Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi, maka Renstra BBPPMPV Pertanian diharapkan mampu menjadi penuntun atau pemandu bagi setiap unit kerja di BBPPMPV Pertanian untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil Renstra BBPPMPV Pertanian menjadi pedoman dalam menyusun: (1) Program Kerja Unit-unit Kerja internal; (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (4) Penetapan Kinerja (PK); (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan potret pengalaman implementasi program kerja beberapa tahun sebelumnya, lembaga perlu melakukan revitalisasi institusi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan performa kelembagaan sehingga dapat menjadi lebih baik. Data menunjukkan SDM yang akan memasuki masa purna tugas, baik unsur struktural maupun fungsional cenderung meningkat, sehingga perlu segera dilakukan regenerasi. Di samping itu, keberadaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi utama lembaga pun nampaknya sudah perlu mengalami pembaruan mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda, sehingga perlu strategi khusus melalui revitalisasi sarana prasarana dan optimalisasi pengelolaan lahan pendukung. Selain itu, urgensi kemitraan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja secara luas dan terbuka merupakan kunci terjadinya kolaborasi guna memastikan tercapainya keselarasan dan kesepadanan (*link and match*) antara dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja.

Globalisasi diartikulasikan sebagai kemampuan memproyeksikan kebutuhan dan beradaptasi dengan cepat serta efektif oleh institusi di masa kini menuju masa depan. Saatnya teknologi yang diperankan secara berdaya guna mendukung lahirnya pendidikan vokasi bidang pertanian yang adaptif terhadap dunia digital, yang bisa jadi akan lebih meraih simpati dan bahkan minat lebih luas dari kalangan generasi muda. Pada akhirnya, dunia pendidikan vokasi bidang pertanian mampu bersaing secara Internasional walaupun dengan potensi keunggulan lokal melalui langkah *re-branding* yang tepat, seperti mendekatkan kebiasaan manusia sekarang yang sangat intim dengan dunia internet untuk diorientasikan pada *Internet of Things* (IoT), komputasional dan digital. Maka eksistensi BBPPMPV Pertanian untuk terus memainkan perannya sebagai *think tank* bagi pendidikan vokasi pertanian di Indonesia tetap bisa terjaga secara konsisten baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Rumusan dasar yang tertuang di dalam BAB I Renstra BBPMPV Pertanian ini terdiri dari 2 (dua), meliputi:

1. Kondisi umum yang menggambarkan pencapaian dalam periode 2015-2019;
2. Potensi permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan menjadi lingkup kewenangan.

1.1. Kondisi Umum

a. Gambaran Umum

Pelaksanaan tugas pokok PPPPTK Pertanian dalam meningkatkan kompetensi Pendidik bidang Pertanian telah dilaksanakan hingga tahun 2019.



Gambar 1. 1 Suasana Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian

Sejumlah 7544 orang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi bidang Pertanian, dan 79.104 orang pendidik bidang lainnya. Untuk tenaga kependidikan sebanyak 7317 orang.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja PPPPTK Pertanian Periode Renstra 2015 – 2019

INDIKATOR KINERJA	Capaian per tahun (Orang)					Capaian Renstra 2015 – 2019 (orang)
	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Jumlah guru yang berkompetenbidang Pertanian	201	2.835	2.432	271	1.805	7.544
2. Jumlah guru yang berkompetenbidang lainnya	274	36.528	320	26.760	15.222	79.104
3. Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat Kompetensinya	1.256	305	208	719	4.829	7.317

Sumber: Laporan Kinerja PPPPTK Pertanian 2015 - 2019

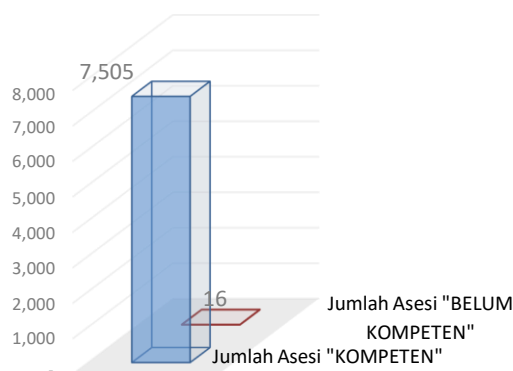
Sebagaimana diuraikan dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024, bahwa salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi lulusan. Relevansi yang dimaksud disini adalah kesesuaian antara kualitas kompetensi yang dihasilkan oleh unit dan jenjang pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas keluaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan pendidikan menengah kejuruan atau SMK. Selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018, Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan teaching factory/techno park, kerja sama dengan industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi.



Sumber: Direktorat PSMK

Grafik 1. 1 Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019

Koordinasi yang dilakukan antara PPPPTK Pertanian (BBPPMPV Pertanian) dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (yang saat ini berubah menjadi Direktorat Sekolah menengah Kejuruan) dalam rangka implementasi program Revitalisasi SMK dalam kurun kurang lebih 4 tahun terakhir telah mampu memetakan tingkat keberhasilan atau capaian program pembinaan dan penguatan SMK, terutama untuk SMK bidang Pertanian. Sebagaimana terlihat dalam grafik 1.1 di atas menggambarkan kontribusi PPPPTK Pertanian (BBPPMPV Pertanian) yang mendukung capaian program vokasi Kemendikbud tahun 2019, melalui pembinaan pada 420 SMK Pertanian melalui program Revitalisasi SMK.



Gambar 1. 2 Suasana Kegiatan Uji Kompetensi Bidang Pertanian

Upaya pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMK yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja, diwujudkan melalui Program Keahlian Ganda (PKG) dan program peningkatan kompetensi guru kejuruan. Program Keahlian Ganda bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari kompetensi yang dikuasai sebelumnya. Guru yang telah mengikuti Program Keahlian Ganda mendapatkan sertifikat profesi dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, sehingga dapat mengampu mata pelajaran lain selain kompetensi keahlian yang sudah dimiliki. Capaian guru adaptif yang memiliki sertifikat keahlian ganda dari LSP di

bidang produktif sejumlah 2.194. PPPPTK Pertanian merupakan salah satu dari 7 (tujuh) UPT Kemendikbud yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi pihak kedua (LSP P2), sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi. Melalui upaya tersebut, diharapkan berdampak pada hadirnya lulusan SMK yang memiliki kompetensi kerja sesuai dan/atau relevan dengan kebutuhan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).

b. Isu Strategis

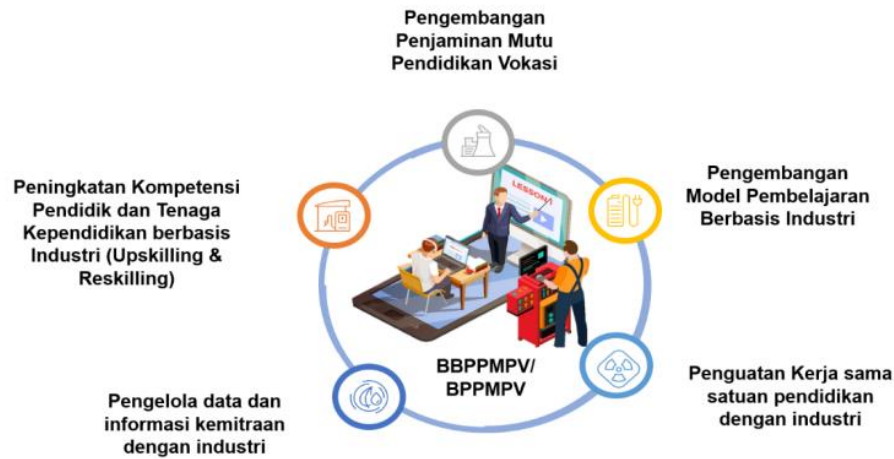
Revitalisasi Pendidikan merupakan upaya yang lebih cermat, lebih gigih dan lebih bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Revitalisasi dalam konteks pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan semua unsur pendidikan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Warga Masyarakat) yang terkait untuk peduli secara riil dalam proses pendidikan SMK. Aspek akhlak mulia, moral dan budi pekerti perlu dimasukkan dalam pengembangan kebijakan, program dan indikator keberhasilan pendidikan melalui Revitalisasi SMK. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan merupakan rambu-rambu yang harus diikuti oleh setiap insan pendidikan kejuruan untuk melakukan perubahan.

Kemampuan individu dalam beradaptasi dengan kecakapan global melalui pemenuhan kompetensi abad ke 21 menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Secara umum keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan *the 21st century skills* ini digambarkan menjadi 4C's skills (keterampilan 4C, yang terdiri dari terampil dalam hal berkomunikasi (*communication*), kreativitas (*creativity*), Kolaborasi (*collaboration*) dan berfikir kritis (*critical thinking*). Aspek akhlak mulia, moral dan budi pekerti perlu dimasukkan dalam pengembangan kebijakan, program dan indikator keberhasilan pendidikan melalui Revitalisasi pendidikan vokasi.

Sebagai tindaklanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*). Istilah “*Link and Match*” mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetitif, seperti etika kerja (*work ethic*), pencapaian motivasi (*achievement motivation*), penguasaan (*mastery*), serta kemampuan dan sikap berkompetisi (*competitiveness*). Disisi lain dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan keterampilan abad ke 21, maka proses kesetaraan dan kesepadanan ini secara terbuka melihat aspek-aspek *common competencies* yang penting untuk dilihat sebagai kemampuan utama. Kemampuan memecahkan masalah, sanggup bekerja secara berkelompok, berfikiran terbuka serta toleran terhadap prinsip dan keyakinan orang lain adalah beberapa hal yang diyakini saat ini sebagai kompetensi penting untuk dimiliki oleh sumberdaya manusia, peserta didik dan lulusan, pendidikan vokasi. Oleh karena itu, terobosan ini memerlukan perubahan kerangka pikir dari seluruh pelaksana pendidikan baik institusi pendidikan maupun staf pengajar harus pro aktif mengembangkan *link* dan *match* dengan industri, dunia usaha dunia kerja.

Dalam rangka menciptakan relasi yang harmonis antara dunia pendidikan vokasi dengan lapangan pekerjaan, diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis serta mudah diterapkan oleh seluruh *stakeholder* pendidikan vokasi. Diawali oleh terjadinya sinkronisasi kurikulum pendidikan vokasi yang nyata dibutuhkan oleh industri, dunia usaha dan dunia kerja, hingga pada perlunya sertifikasi kompetensi yang dilakukan langsung oleh dan/atau berbasis industri. Adanya program peningkatan kompetensi guru melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi dengan industri yang terukur dengan pola pengajaran dan pendampingan langsung oleh mitra industri melalui program *upskilling* dan *re-skilling* berstandar industri adalah prioritas utama yang akan dicapai melalui praktik kerja industri atau magang menggunakan model *project-based learning*. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen kuat dari mitra industri, dunia usaha dan dunia kerja untuk mendukung ketercapaian diklat vokasi berbasis industri. Terkait dengan gambaran umum dan isu strategis sebagaimana tertuang di atas, secara

utuh Ditjen Diksi dalam renstranya menjelaskan adanya lima program utama sebagaimana pada gambar di bawah.



Gambar 1. 3 Lima fokus implementasi kebijakan

Lima fokus implementasi kebijakan tersebut, dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

Sistem pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi merupakan sistem terpadu dan berkelanjutan. Sistem terpadu yang dibangun merupakan integrasi antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Secara berkelanjutan menunjukkan aktivitas penjaminan mutu berjalan secara kontinuitas dari mulai perumusan standar mutu, pemetaan mutu, peningkatan mutu, serta aktivitas pendampingan untuk menjamin mutu satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Di samping itu pelaksanaan penjaminan mutu melibatkan dan memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kota, atau kabupaten, sehingga memungkinkan sistem ini dapat mendukung prioritas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, BBPMPV Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam siklus SPM Pendidikan vokasi terutama dalam pemetaan serta peningkatan mutu pada satuan pendidikan SMK. Bersama Pemerintah Daerah, BBPMPV Pertanian melaksanakan kajian terhadap mutu pendidikan Vokasi

Pertanian, efektivitas program, dan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing, untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas kinerja di tingkat provinsi dan nasional.

2. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Industri

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bidang Pertanian berbasis industri adalah salah satu arah pengembangan kebijakan utama pada BBPPMPV Pertanian di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Program *upskilling/reskilling* kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan program ini dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan yang dihadapi, serta tanggung jawab BBPPMPV Pertanian untuk meningkatkan kualitas SDM Pendidikan vokasi, khususnya di bidang pertanian. Selain itu, melalui digitalisasi perangkat diklat program *upskilling* dan *reskilling* guru kejuruan berstandar industri, upaya pengembangan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru kejuruan yang kompeten dan profesional dan berstandar industri juga dapat dilaksanakan.

3. Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Industri

BBPPMPV Pertanian juga melaksanakan pengembangan inovasi pembelajaran berbasis *link and match (centre of innovation)*. Hasil inovasi atau pengembangan model pembelajaran diharapkan meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat bekal yang cukup berupa *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar dunia industri. Pengembangan inovasi pembelajaran melalui aktivitas penelitian dan pengembangan dilakukan oleh BBPPMPV Pertanian pada bidang Agribisnis dan Agroteknologi. Melalui aktivitas pengembangan model dan inovasi pembelajaran berbasis industri diharapkan dapat menghasilkan model-model inovasi pembelajaran yang pada hakikatnya merupakan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan vokasi.

4. Penguatan Kerja Sama Satuan Pendidikan dengan Industri

Pengembangan mutu pendidikan vokasi berbasis kompetensi harus *link and match* dengan industri guna membangun manusia yang terampil, berdaya saing dan siap bekerja dibidang industri. Untuk itu, keterlibatan BBPPMPV Pertanian dalam menjalankan kebijakan dan strategi pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas dan peningkatan produktivitas dan daya saing dilakukan melalui pendampingan secara utuh kepada Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi sasaran pembinaan di wilayah BBPPMPV Pertanian.

5. Pengelola Data dan Informasi Kemitraan dengan Industri

Pengelolaan data dan informasi kemitraan yang menjadi salah satu arah kebijakan bagi BBPPMPV Pertanian harus dilaksanakan dengan bermitra bersama industri. Sebagai implementasi pelaksanaan strategi pengelolaan data dan informasi, pengembangan beberapa inovasi terkait pelayanan publik menjadi strategi yang tepat. Inovasi ini antara lain dapat berbentuk mengaktifkan penggunaan website sebagai representasi lembaga secara digital, menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan yang terutama mendirikan Unit Layanan Terpadu (ULT) dimana masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi, pengaduan, berkonsultasi, serta memberikan saran dan masukan dengan nyaman dan memperoleh kepastian mendapatkan tanggapan yang baik dan profesional. Dalam mendukung sistem penjaminan mutu pendidikan vokasi yang komprehensif, berbasis data, dinamis, dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhannya, BBPPMPV Pertanian juga akan mengembangkan aplikasi/portal penjaminan mutu pendidikan vokasi yang memuat data mutu seluruh SMK, PTV dan LKP di wilayah binaan. Dalam pelaksanaannya nanti, pemanfaatan pengelolaan data dan informasi ini diharapkan juga membuka kesempatan pada SMK, PTV dan LKP untuk dapat mengakses beragam aplikasi tersebut, sehingga portal penjaminan mutu ini juga sekaligus menjadi media *sharing best practice* dalam pendidikan vokasi.

1.2. Potensi dan Permasalahan

a. Permasalahan

Penetapan alokasi target dan sasaran program, serta luasnya cakupan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh BBPPMPV Pertanian menjadi tantangan yang harus dihadapi. Daya dukung anggaran menjadi hal yang sangat penting jika melihat beban kerja serta cakupan wilayah garapannya. Sebagai gambaran, untuk melayani sebanyak lebih dari 14 ribu dan lebih dari 2.461 SMK bidang pertanian, serta Tenaga Kependidikan lainnya, jumlah pembabakan cascading program pada angka rata-rata normal sebesar 20-25 % per tahun. Akan tetapi, beban program serta target okupansi tersebut belum selaras dengan alokasi anggaran yang diberikan. Alokasi anggaran yang tersedia masih jauh dibawah harapan, sehingga keberhasilan pencapaian target sasaran program belum optimal.

Di lain pihak akibat dari posisi BBPPMPV Pertanian sebagai salah satu UPT Kemdikbud dibawah Ditjen Diksi, menjadikan unit utama diatasnya bisa secara langsung dapat mengintervensi proses eksekusi program. Tugas pokok dan fungsi yang bersifat *mandatory* dalam kaitannya dengan instruksi penuntasan capaian program yang dikeluarkan oleh Ditjen Diksi harus dapat dintuntaskan secara paralel dengan program kerja yang dimiliki oleh BBPPMPV. Oleh karena itu perlu strategi dan pengelolaan yang tepat dalam mengawal dan memastikan semuanya dapat terselesaikan dengan baik.

b. Analisis Masalah

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal BBPPMPV dapat diidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi agar dapat segera diantisipasi langkah yang tepat dalam melaksanakan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang Pertanian dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan meliputi Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Acaman, sebagaimana tercantum dalam tabel analisis dibawah ini.

S	W	O	T
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan pengembangan pendidikan dan pelatihan pertanian yang cukup luas. ▪ Ruang belajar diklat memenuhi syarat ▪ Jumlah penginapan sudah memenuhi kebutuhan ▪ Kompetensi fasilitator diklat (widyaiswara, PTP, teknisi, laboran, dan fungsional lainnya) yang sangat berpengalaman. ▪ Sudah memiliki LSP P2 ▪ Asesor kompetensi keahlian yang berlisensi dan diakui secara nasional. ▪ Lembaga berpredikat WBK dan Pelayanan Prima ▪ Kesiapan fasilitasi peningkatan kompetensi menuju proses <i>hybrid learning and training</i>. ▪ Pembinaan SMK kembali di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana praktik diklat belum mutakhir dan kurang memadai ▪ Fasilitas ruang belajar perlu pembaruan ▪ Fasilitas penginapan perlu pembaruan ▪ Jumlah SDM semakin berkurang ▪ Penempatan SDM belum sesuai kompetensinya ▪ Peningkatan kompetensi SDM belum merata ▪ Proses Relisensi LSP P2 perlu diagendakan secara periodik ▪ Jumlah Asesor kompetensi keahlian yang berlisensi semakin berkurang ▪ Pengakuan kompetensi profesional widyaiswara belum diakui oleh DUDIKA ▪ Budaya kerja belum sesuai sistem manajemen mutu ▪ Sistem <i>Reward and</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SMK bidang Pertanian seluruh Indonesia sebanyak 2.017 ▪ Struktur kelembagaan baru yang mendukung tugas pokok dan fungsi. ▪ Revitalisasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi pertanian. ▪ Rekonstruksi dan perancangan desain kurikulum diklat yang sangat dinamis. ▪ Domain garapan yang lebih luas terdiri dari SMK, PT Vokasi, dan LKP. ▪ Digitaliasi layanan diklat menciptakan tren pertanian yang modern dan menyenangkan, melalui model <i>smart ingrated farming</i>. ▪ Desain pengembangan diklat berbasis keterampilan abad 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Vokasi bidang pertanian dan teknik kimia yang didampingi (SMK-PTV-LKP) belum memenuhi standar. ▪ Kurang seimbang nya percepatan kemajuan teknologi industri di bidang pertanian dengan pemenuhan kompetensi dan kapasitas lembaga ▪ Tingginya tingkat pengangguran dihasilkan oleh pendidikan menengah kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS. ▪ Intervensi program mandatory kemendikbudristek terhadap UPT ▪ Kesenjangan kompetensi (<i>competency gap</i>) yang masih terjadi di lingkungan

S	W	O	T
<p>bawah BBPPMPV.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah mitra DUDIKA terpenuhi ▪ Memiliki peta jalan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang Pertanian yang terukur. ▪ Komitmen pimpinan dan seluruh warga BBPPMPV Pertanian dalam upaya memajukan layanan fasilitasi peningkatan kompetensi dan pendampingan pengembangan pendidikan vokasi pertanian 	<p><i>Punishment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus pembinaan SMK terlalu luas karena berbasis wilayah. ▪ Partisipasi DUDIKA terhadap program BBPPMPV belum optimal ▪ Penggunaan KKN sebagai rujukan dalam menyusun kurikulum diklat yang masih termarginalkan. ▪ Perangkat diklat belum dimutakhirkan secara berkala 	<p>ke21.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan untuk melakukan <i>Upgrading sarana</i> dan prasarana pendukung fasilitasi peningkatan kompetensi PTK bidang pertanian. ▪ <i>Link and match</i> antara BBPPMPV Pertanian dengan SMK dan DUDIKA. ▪ Kolaborasi Riset terapan antara BBPPMPV P – SMK – DUDIKA. ▪ Pengembangan model <i>teaching/learning factory</i> di pendidikan vokasi bidang pertanian. ▪ Menjadi <i>Center of Excellent</i> bagi pendidikan vokasi pertanian. ▪ Inovasi keterampilan teknis bidang pertanian 	<p>internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Munculnya Lembaga diklat yang sejenis.

Dari analisis di atas, beberapa permasalahan yang sekaligus juga merupakan tantangan (*challenges*) dapat digambarkan sebagai potensi di masa depan adalah :

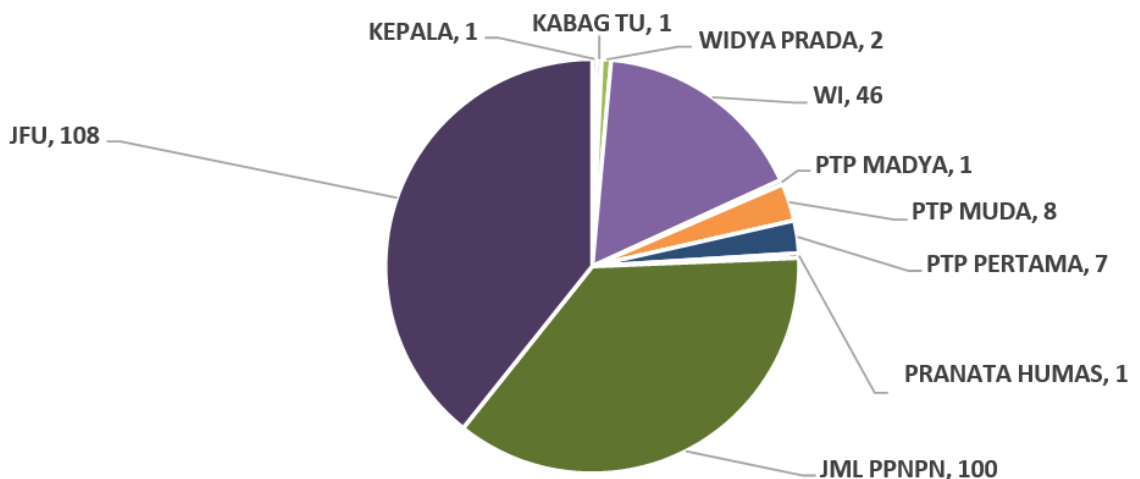
- 1) Potret dan pemetaan mutu SMK, PTV dan LKP bidang Pertanian di seluruh Indonesia.
- 2) Profil dan promosi SMK pertanian yang umumnya ada di wilayah pedesaan.
- 3) Pengembangan model *teaching/learning factory* di pendidikan vokasi bidang pertanian.
- 4) Integrasi kurikulum adaptif-normatif-produktif kedalam proses pembelajaran.
- 5) Merekonstruksi proses Pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based learning*).
- 6) Implementasi model pembelajaran Keterampilan Abad ke 21 (*21st Century Skills*).
- 7) Pengembangan dan implementasi pembelajaran dalam pencapaian kompetensi *hard skill* dan *soft skill* bidang keahlian pertanian yang otonom, terintegrasi, kolaborasi secara konsisten, dan berkelanjutan.
- 8) Peningkatan kemampuan wirausaha bidang pertanian.
- 9) Penguatan budaya kerja guru dan siswa melalui magang di DUDIKA.
- 10) Penyelarasan SMK dengan DUDIKA.
- 11) Keterlibatan praktisi DUDIKA dalam memberikan pengajaran di SMK.
- 12) Mendorong peningkatan keterserapan lulusan SMK di DUDIKA sesuai bidangnya.
- 13) Sinkronisasi kurikulum Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian antara BBPPMPV Pertanian dengan DUDIKA.
- 14) Peningkatan dan kecukupan SDM Widyaiswara dan teknisi baru yang profesional dan menguasai teknologi pertanian modern.
- 15) Pengakuan kompetensi keahlian Widyaiswara melalui sertifikasi oleh DUDIKA.
- 16) Merevitalisasi sarana dan prasarana diklat.
- 17) Paradigma fasilitasi peningkatan kompetensi yang mengarah ke *blended learning* atau *hybrid learning*.
- 18) Meningkatkan kompetensi Literasi TIK SDM;
- 19) Membangun komunitas guru bidang keahlian produktif di setiap daerah.
- 20) Membangun komunitas guru adaptif-normatif terapan SMK pertanian di setiap daerah.
- 21) Membantu Ditjen Vokasi dalam menghasilkan (memproduksi) dan mendistribusikan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas.
- 22) Meningkatkan peran Dinas Pendidikan provinsi dalam peningkatan kompetensi Guru.
- 23) Meningkatkan peran BBPPMPV Pertanian dalam pembinaan Guru Pertanian.
- 24) Mengadaptasi kecakapan global melalui pengembangan platform layanan berbasis Digital society 5.0.
- 25) Peran pembinaan manajemen sekolah oleh BBPPMPV Pertanian kepada SMK Pertanian.
- 26) Pemerataan akses bagi SMK swasta dan SMK Negeri.
- 27) Kolaborasi Riset terapan antara BBPPMPV P – SMK – IDUKA.
- 28) Menciptakan tren pendidikan pertanian modern dan menyenangkan.

- 29) Melahirkan entrepreneur muda bidang pertanian.
- 30) Pengadaan kekurangan SDM Widyaiswara dan teknisi baru
- 31) Masih terdapat SMK Pertanian berdasarkan penilaian belum sesuai dengan SNP SMK.
- 32) Pemerataan kompetensi guru, akses pendidikan, akses informasi termasuk internet dan teknologi pertanian pada SMK pertanian yang umumnya ada di wilayah pedesaan.
- 33) Pergeseran teknik pembelajaran konvensional ke arah digital (virtual).
- 34) Pemerataan akses pembelajaran bidang pertanian sampai ke daerah 3T.
- 35) Memperkuat sistem tabulasi dan inventarisasi data.
- 36) Peningkatan kemampuan guru vokasi dalam merespons pembelajaran keterampilan Abad ke 21
- 37) Mensinkronisasi Renstra Diksi dengan Tusi BBPPMPV Pertanian.

c. Potensi

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang pertanian, BBPPMPV didukung oleh SDM yang cukup memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Jumlah SDM BBPPMPV Pertanian yang ada saat ini adalah sebanyak 275 orang dengan rincian sebagai berikut :



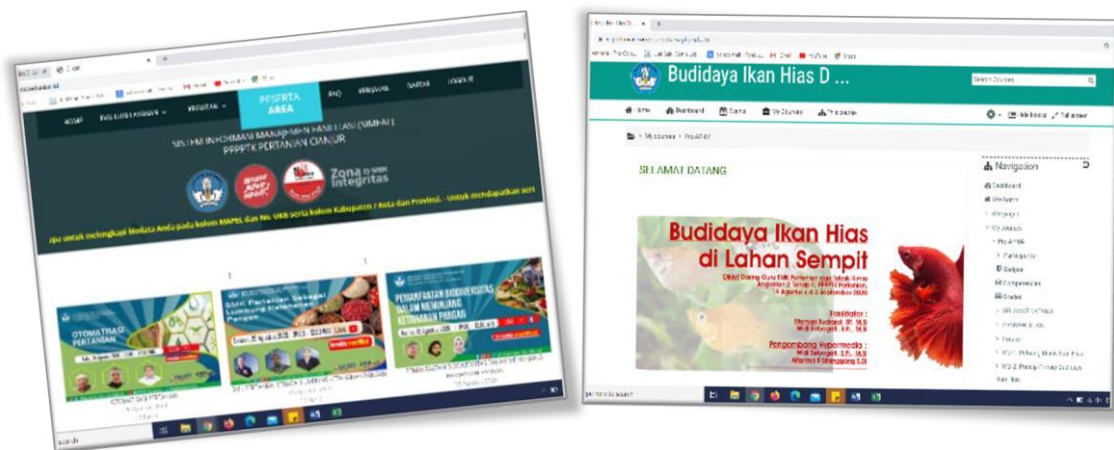
Grafik 1. 2 Sumber Daya Manusia

2. Fasilitas



Sebagai lembaga yang bertugas untuk peningkatan kompetensi Guru dan tenaga kependidikan pertanian, BBPMPV Pertanian memiliki beragam fasilitas pendukung, dari mulai fasilitas teori, praktik hingga terapan.

Sumber belajar untuk mendukung kegiatan pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada berupa Perpustakaan yang telah dilengkapi oleh berbagai sumber belajar antara lain berupa perpustakaan dengan jumlah koleksi bukusebanyak 5.638 judul, 178 CD pembelajaran, serta katalog online dengan link <http://perpus-pertanian.kemdikbud.go.id/> dan Aplikasi repository online: <http://repositori.kemdikbud.go.id/>. Laboratorium Komputer sebanyak 2 unit dengan kapasitas 48 komputer; Ruang belajar yang nyaman sebanyak 18 Kelas dengan kapasitas 20 orang perkelas, Fasilitas Audio/ Sound System pada masing-masing kelas, fasilitas layanan Koneksi internet dengan kecepatan 170 Mbps dan Aplikasi Administrasi online / Simfal: bbppmpvpertanian.id.



Gambar 1. 4 Learning Management System yang digunakan pada diklat daring

3. Fasilitas pendukung lainnya

Fasilitas pendukung yang dimiliki BBPPMPV Pertanian berupa; Asrama dengan kapasitas : 250 Orang, Masjid, Mushola, Toilet, Klinik beserta Sarana



pendukung protokol Kesehatan selama masa Pandemi (tempat cuci tangan, semprot kendaraan dan staff), Parkiran Luas dan aman, Ruang tunggu dengan bahan bacaan, Poliklinik, Kamar Laktasi, Toilet untuk orang Berkebutuhan Khusus, Kursi roda, Tempat Parkir untuk orang kebutuhan

khusus, kolam renang, wahana bermain (Playground) untuk anak, Jalur khusus untuk kebutuhan khusus, Lahan tanam, Kebun Praktik, Kolam ikan, Kandang, Bengkel, Lapangan olahraga, Ruang kebugaran (*Fitness*), dan Kantin.



Gambar 1. 5 Fasilitas Asrama (kamar dan restoran) yang nyaman, Ruang Laktasi Lengkap, Lahan Parkir yang memadai serta Fasilitas perkantoran ramah difabel.



Gambar 1. 6 Ruang Sidang, Ruang Teori, Ruang Fitness, Ruang Kantin dan Ruang Serba Guna

4. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal yang berpengaruh positif merupakan “peluang” bagi BBPMPV Pertanian dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Visinya. Peluang yang dimaksud adalah:

- a. Komitmen pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008 sesuai dengan amandemen ke 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- b. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru.
- c. Belum semua satuan pendidikan memiliki Pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai seperti Guru, Dosen, Instruktur, teknisi, pustakawan, tenaga

laboratorium, Kepala sekolah dan pengawas yang berlisensi.

- d. Meningkatnya tuntutan sertifikasi kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA atau pihak ketiga.
- e. Besarnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
- f. Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar menjangkau daerah-daerah yang terpencil sehingga dapat mendukung efisiensi pengelolaan e-administrasi pendidikan.

Kondisi eksternal yang dapat menghambat yang dapat dikategorikan sebagai “ancaman” bagi BBPPMPV Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a. Kenaikan anggaran pendidikan melalui APBN sebesar 20% tidak berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi serta Kinerja Guru dan tenaga Kependidikan. Kenaikan anggaran pendidikan lebih banyak untuk keperluan pemenuhan tunjangan profesi Guru, Kepala sekolah dan Pengawas. Namun demikian tunjangan profesi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas.
- b. Otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak kepada adanya kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur sendiri bagaimana meningkatkan mutu PTK-nya, sementara itu koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah memerlukan biaya dan waktu serta tantangan tersendiri.

BAB II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi BBPPMPV Pertanian

BBPPMPV Pertanian yang sebelumnya PPPPTK Pertanian merupakan salahsatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) tahun 2020, serta UPT pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen DIKSI) tahun 2021 – 2024, pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka BBPPMPV Pertanian mendukung sepenuhnya visi dan misi Kemendikbudristek 2020 – 2024, yaitu:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.”

B. Misi BBPPMPV Pertanian

Salah satu misi Kemendikbudristek yang merupakan tugas dari BBPPMPV Pertanian sebagaimana tertuang dalam misi pertama, yaitu:

“Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.”

Peningkatan relevansi lulusan pendidikan vokasi (SMK) mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, dimana Kemendikbudristek melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional. Pendidikan sebagai faktor utama pembentukan SDM sebagai ikhtiar mencetak generasi unggul, bermutu serta berkelanjutan merata diseluruh penjuru tanah air. Tentu dalam proses Pendidikan mesti didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang layak dan terstandar serta sesuai dengan sasaran pembentukan kompetensi yang diampunya.

C. Tujuan dan Sasaran Kemendikbudristek yang Relevan

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek menetapkan 5 (lima) sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu:

No	Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sasaran Strategis
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
3	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4	Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi	Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

(Renstra Kemendikbudristek, hal. 40)

BBPPMPV Pertanian mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Kemendikbudristek tersebut, terutama yang kedua, yaitu :

Tujuan Kemendikbudristek	Sasaran Kemendikbudristek
Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang

D. Tata Nilai yang Dianut

Tata nilai yang dianut dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi yang harus dijadikan semboyan bagi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berhubungan satu sama lainnya menekankan pada aspek manusia sebagai pelaku organisasi. Norma yang menjadi tata nilai dasar yang telah dianut dan akan terus dipertahankan adalah “*versatile,*

dedicated and caring". Secara filosofis nilai-nilai tersebut diorientasikan pada upaya mencapai visi dan misi BBPPMPV Pertanian dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

Versatile

- Cakap : bekerja ikhlas, cerdas, berhasil dan tuntas
- Profesional : kompeten, jujur, menyukai keunggulan yang dimiliki

Dedicated

- Loyal : konsisten terhadap pekerjaan
- Disiplin : tepat waktu dan taat peraturan
- Tanggungjawab : memiliki komitmen terhadap pekerjaan

Caring

- Peduli : tanggap terhadap kondisi, kebutuhan dan kepentingan lembaga, sesama dan masyarakat

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai visi dan misi tersebut, maka BBPPMPV Pertanian perlu menyusun Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.

2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan rujukan yang diambil dari Sasaran Program Ditjen GTK dan Ditjen DIKSI, maka BBPPMPV Pertanian menetapkan sasaran dan tujuan strategis, agar dapat menggambarkan terlaksananya visi dan misi dengan jelas. Lebih spesifik dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2. 1 Tujuan Strategis BBPPMPV Pertanian tahun 2020 – 2024

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL	TUJUAN STRATEGIS BBPPMPV Pertanian
2020 (DITJEN GTK)	2020
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
2021 (DITJEN DIKSI)	2021
SP 1. Meningkatnya Jumlah Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi yang Memperoleh Pekerjaan dan Berwirausaha Dalam Satu Tahun Setelah Kelulusan	TS1. Meningkatnya Jumlah Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi yang Memperoleh Pekerjaan Dan Berwirausaha Dalam Satu Tahun Setelah Kelulusan
SP5. Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	TS3. Menguatnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas

2022-2024 (DITJEN DIKSI)	2022 - 2024
SP 2. Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	TS 1. Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
SP 4. Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	TS 2. Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Tujuan BBPMPV Pertanian tahun 2020 -2024

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2020/2024
2020	2020	2020
Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan	100%
2021	2021	2021
TS1. Meningkatnya Jumlah Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi yang Memperoleh Pekerjaan Dan berwirausaha Dalam Satu Tahun Setelah Kelulusan	1. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	60%
TS3. Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas	2. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BBpredikat BB	87
	3. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	98
2022-2024	2022-2024	2022-2024
TS 1. Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	60%
TS 2. Menguatnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	2. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	A
	3. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	96

2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran strategis menggambarkan kondisi dan tahapan-tahapan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan di akhir periode Renstra. BBPMPV Pertanian telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sepanjang periode Renstra 2020 - 2024 dan akan menopang ketercapaian sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi. Untuk itu, penyusunan sasaran strategis BBPMPV Pertanian harus berpedoman pada sasaran strategis Ditjen Pendidikan Vokasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BBPMPV. Secara

rinci, perwujudan tujuan strategis yang dijabarkan kedalam sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan diatas, ditetapkan target capaiannya selama 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BBPMPV Pertanian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2020 (DITJEN GTK)		2020
Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (SK)	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan gurupenggerak	3.610 orang
2021 (DITJEN DIKSI)	2021	2024
SK 1. Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri	IKK 1. Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri	2.846 orang
	IKK 2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	660 orang
	IKK 6. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory	92 model
SK 4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	IKS 8. Rata-rata predikat SAKIP Satkerminimal predikat BB	A
	IKS 9. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93,5
2022-2024 (DITJEN DIKSI)	2022-2024	2024
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	IKK 1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4.139 orang
	IKK 2. Jumlah satuan pendidikan vokasidengan mutu yang terpetakan	957 lembaga
	IKK 3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	7 model
SK 4. Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	IKS 8. Rata-rata predikat SAKIP Satkerminimal predikat BB	A
	IKS 9. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	96

Tabel 2. 4 Target Kinerja Sasaran Strategis BBPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020)						
IKK Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	3.610	-	-	-	-
SK 1. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi berbasis kerja sama industri (2021)						
IKK 1. Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> berstandar	Orang	-	640	686	734	786
IKK 2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial	Orang	-	330	110	110	110
IKK.3. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	Model	-	20	22	24	26
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi (2022 – 2024)						
IKK 1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	-	-	1.241	1.380	1.518
IKK 2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Orang	-	-	319	319	319
IKK 3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	-	-	2	2	3
SK 2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi (2021 – 2024)						
IKK 4. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal A	Predikat	BB	A	A	A	A
IKK 5. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Predikat	93	93	93	95	96

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Bangsa Indonesia harus menyiapkan kualitas SDM yang kuat agar mampu beradaptasi, berkompetisi, dan bersaing di tengah arus globalisasi dan perkembangan inovasi teknologi yang sangat pesat dewasa ini. Melalui pembangunan SDM yang adaptif dan berkelanjutan, bangsa Indonesia akan siap mencapai cita-cita kemerdekaan secara utuh sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa- bangsa maju lain di dunia.

Pembangunan SDM yang menjadi kewenangan kemendikbudristek, sangat memperhitungkan trend global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang Pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan antar lain:

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti: konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), dan *delivery drone*.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadinya pergeseran demografi dan profil sosio ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang dengan harapan hidup lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, bidang lingkungan hidup kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 tahun kedepan. Penggunaan alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak buruk dari perubahan iklim dan populasi.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Keterkaitan antar perubahan ketiga hal diatas,

membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tidak mengenal batas geografis dan tidak terikat mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertambah pesat. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya.

Arah kebijakan Kemendikbudristek merupakan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) pada setiap tujuan strategis dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Berikut ini adalah sasaran program pada indikator kinerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

1. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran kegiatan untuk mendukung Sasaran Program (SP) pada Tujuan Program (TP) serta mendukung Sasaran Strategi (SS) sesuai Nawacita: Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi Pendidikan melalui sistem penjaminan mutu Pendidikan yang berkualitas.
 - 1) Menerapkan asesmen nasional (asesmen kompetensi minimum, survey karakter dan survei lingkungan belajar) sebagai instrument dalam mengukur kualitas belajar. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya sasaran program tersebut melalui:
 - a) Berkolaborasi dengan dinas Pendidikan provinsi didalam mendukung kegiatan asesmen nasional pada satuan Pendidikan SMK
 - b) Melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran di satuan Pendidikan. Keterlibatan profesional industri menjadi suatu kolaborasi yang sangat bermanfaat, dimana kehadiran profesional industri mendekatkan antara teori dan kenyataan yang terjadi pada dunia kerja sesungguhnya.
 - c) Menyelenggarakan pembinaan bagi terwujudnya teaching factory. Pembelajaran berbasis pada dunia industri menjadikan peserta didik mendapatkan pengalaman secara nyata model atau sistem yang berlaku pada dunia industri. Kebiasaan yang dilakukan pada proses pembelajaran sama dengan apa yang terjadi pada dunia industri, menjadikan siswa lebih siap dalam bekerja di dunia kerja.

- d) Menerapkan kurikulum link and match dengan industri, dalam arti yang dipelajari oleh peserta didik pada pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dan analisis perkembangan kebutuhan pada DUDI.
 - e) Menerapkan model pendidikan vokasi yang berbasis link and match dengan industri, maka kompetensi peserta didik akan mampu memenuhi kebutuhan pekerja yang dibutuhkan oleh dunia industri.
 - f) Menerapkan pembelajaran pendidikan vokasi berbasis link and match, maka kualitas lulusan pendidikan vokasi dapat terserap pada dunia industri. Melalui kompetensi yang diperoleh setelah lulus pendidikan tinggi sesuai dengan arus kebutuhan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan permintaan DUDI.
- 2) Mengembangkan profil dan rapor pendidikan di tingkat daerah dan satuan pendidikan dengan menggunakan asesmen nasional dan data pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya sasaran kegiatan untuk mendukung Sasaran Program melalui:
- a) Mendampingi menganalisis rapor pendidikan daerah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada satuan pendidikan SMK di bawah binaan provinsi, sehingga pemerintah daerah akan membuat program kegiatan untuk satuan pendidikan SMK di bawah binaannya dalam skala prioritas
 - b) Mendampingi menganalisis rapor pendidikan satuan pendidikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada satuan pendidikan SMK, sehingga satuan pendidikan akan membuat program kegiatan untuk satuan pendidikan SMK dalam skala prioritas
 - c) Mendampingi pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis rapor pemerintah daerah
 - d) Mendampingi pelaksanaan kegiatan di satuan pendidikan SMK berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan
 - e) Meningkatkan jumlah guru dan kepala SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri, melalui usaha: (1) meningkatkan jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri, dan (2) meningkatkan jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri.
 - f) Meningkatkan persentase SMK yang sumber daya (*resources*)nya dimanfaatkan oleh *stakeholders* dalam konteks kerjasama profesional, melalui usaha pelibatan praktisi profesional dari dunia industri untuk bersama-sama mengembangkan kualitas peserta didik SMK dalam proses pembelajaran. Hal tersebut akan melahirkan inovasi dan kreativitas dalam optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh SMK sehingga *output* atau hasil inovasi, kreativitas dan daya cipta baru yang dilahirkan dalam proses pembelajaran akan dapat dimanfaatkan oleh DUDI dalam konteks kerjasama profesional.

- g) Meningkatkan persentase SMK yang menyelenggarakan *teaching factory*, melalui usaha pendampingan serta pembinaan secara berkelanjutan agar jumlah SMK mampu menyelenggarakan *teaching factory*.
- 3) Memperkuat pemanfaatan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung penjaminan mutu dan akreditasi otomatis. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapainya sasaran kegiatan yang mendukung sasaran program melalui:
- a) Meningkatkan kualitas SDM satuan pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi pada kemampuan literasi
 - b) Meningkatkan kualitas SDM satuan pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi pada kemampuan numerasi
 - c) Meningkatkan kualitas SDM satuan pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi pada kemampuan pengembangan karakter
 - d) Meningkatkan kualitas SDM satuan pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi pada kemampuan dalam membuat lingkungan belajar yang kondusif
 - e) Meningkatkan kualitas SDM satuan pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi pada kemampuan peningkatan kualitas proses pembelajaran
 - f) Meningkatkan kualitas SDM satuan pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi pada guru dan kepala sekolah
 - g) Meningkatkan kualitas SDM satuan pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi pada kemampuan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
- 4) Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan untuk mendukung sasaran program melalui: Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri.
- 5) Terwujudnya tata Kelola BBPPMPV Pertanian yang berkualitas. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya sasaran kegiatan yang mendukung sasaran program melalui:
- a) Predikat SAKIP BBPPMPV Pertanian minimal A.
 - b) BBPPMPV Pertanian mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
2. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Kegiatan (SK) untuk mendukung Sasaran Program (SP) pada Tujuan Program (TP) untuk mencapai Sasaran Strategis (SS): meningkatnya dan meratanya kualitas dan relevansi pendidikan melalui optimalisasi lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 1) Menjalankan program SMK Pusat Keunggulan untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran serta peningkatan kualitas lulusan. Arah

kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya sasaran program tersebut melalui:

- a) Mendampingi proses IHT komite pembelajaran pada satuan pendidikan
 - b) Mendampingi proses implementasi pembelajaran pada satuan pendidikan
 - c) Mendampingi proses assesmen pembelajaran
- 2) Membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industri untuk:
- a) Memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja;
 - b) Menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industri;
 - c) Menyediakan pemagangan dan praktik kerja;
 - d) Mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; dan
 - e) Menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri;
- 3) Menitikberatkan pengembangan *soft skills* pada pelaksanaan diklat dengan konsep pengembangan SDM PTK pada:
- a) Kemampuan berpikir kritis,
 - b) Kemampuan komunikasi,
 - c) Pemecahan masalah, dan komunikasi,
 - d) Penanaman nilai etos kerja, dan
 - e) Kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja
- 4) Mengembangkan platform teknologi

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek merencanakan beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan. BBPPMPV Pertanian akan memberikan kontribusi sesuai bidang tugas pada periode waktu tahun 2020-2024. Mengacu pada Renstra Kemendikbudristek 2020-2024, maka kerangka regulasi yang sesuai bidang tugas BBPPMPV Pertanian, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi Kemendikbudristek

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Peran BBPPMPV Pertanian
1	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. <p>Dari ketujuh agenda tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4, dan 7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 	Memberikan masukan dan dukungan data dan informasi terkait potensi dan permasalahan SMK Pertanian.

Sumber: Renstra Kemendikbudristek 2020-2024

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung oleh regulasi yang memadai sebagai sebagai legalitas operasionalisasi dari arah kebijakan BBPPMPV Pertanian. Kerangka regulasi diarahkan untuk penyediaan peraturan perundangan yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah identifikasi Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen maupun Keputusan Dirjen yang terkait dengan kegiatan, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antara pusat dan daerah.

Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang terkait dengan Program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian 2020 - 2024 serta urgensinya.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter
2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*.
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem *merit* yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan visi/misi BBPPMPV Pertanian; (ii) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang didalamnya termasuk Organisasi dan Tata kerja BBPPMPV. BBPPMPV menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
2. pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usahadan dunia industri;
4. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikanpada pendidikan vokasi;
5. pengelolaan data dan informasi;
6. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
7. pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi.

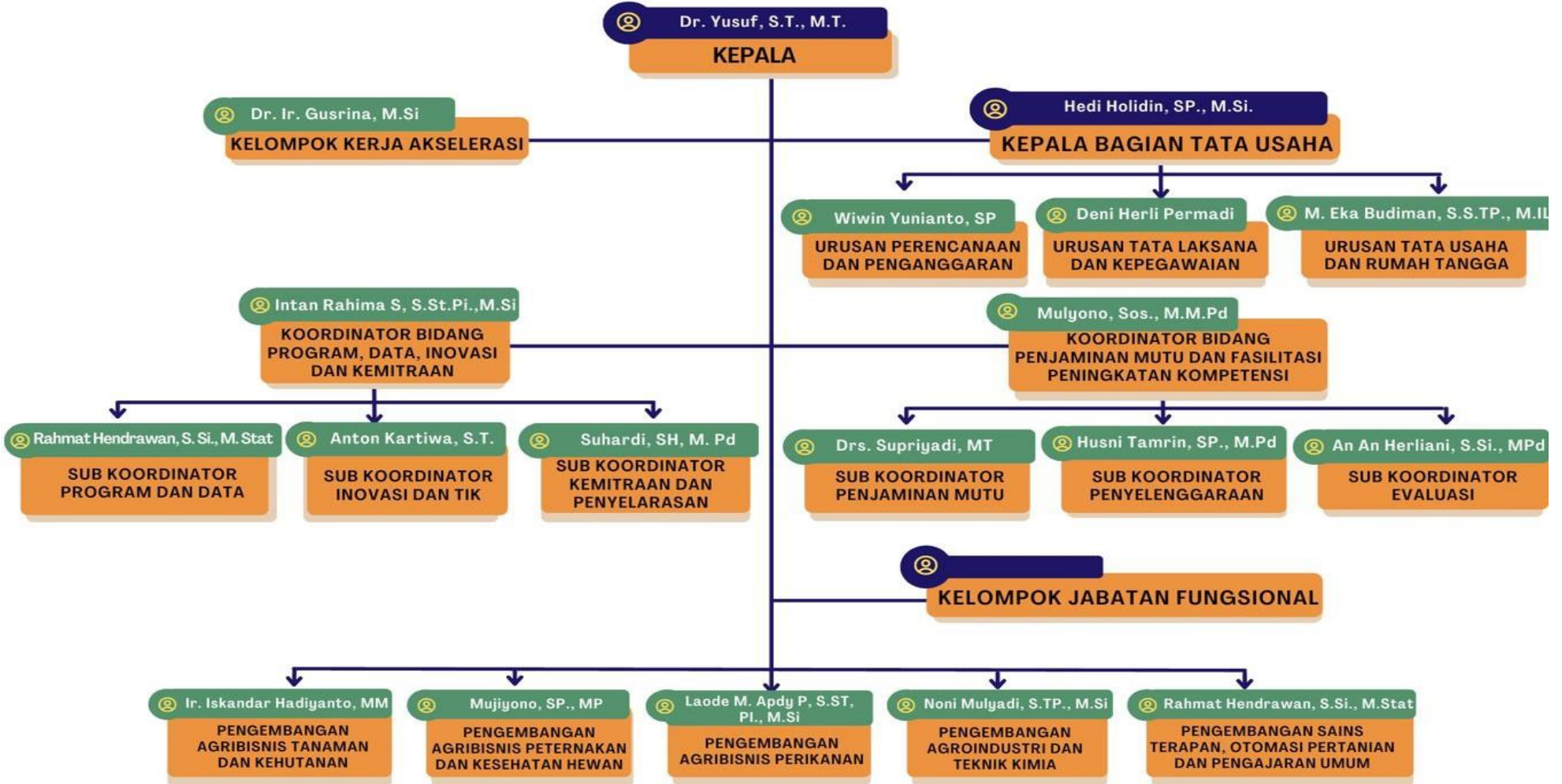
3.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya, organisasi BBPPMPV Pertanian terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar
2. Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BBPPMPV Pertanian, Kepala BBPPMPV Pertanian menetapkan Surat Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian No. 0557/D7.4/KP.09.00/2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPPMPV Pertanian dan Surat Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian No. 0822/D7.4/KP.09.00/2022 Tentang Pengangkatan Koordinator/Sub Koordinator dan Urusan Bagian Tata Usaha di Lingkungan BBPPMPV Pertanian Periode 2022-2024. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian dalam SK tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan 3.1. Struktur Organisasi BBPPMPV Pertanian



Permendikbud No. 26 Tahun 2020

Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian

3.3.2 Pengelolaan SDM

Pengejawantahan visi dan misi lembaga yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh warga yang ada merupakan hal penting yang harus terjadi. Oleh karena itulah BBPPMPV Pertanian berusaha keras untuk dapat melakukan optimalisasi peran dan fungsisetiap individu warga lembaga secara menyeluruh. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbudristek. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis dan terukur.

Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbudristek juga merupakan hal yang sangat penting. Dengan semangat perubahan menuju ke arah organisasi modern dan lebih baik, strategi pengelolaan SDM di BBPPMPV Pertanian Cianjur diorientasikan pada beberapa komponen kerja atau tugas sebagaimana tercantum di bawah ini:

- (1) Pengembangan Struktur Organisasi, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kabag Tata Usaha
 - Urusan Perencanaan dan Penganggaran
 - Urusan Tatalaksana dan Kepegawaian
 - Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - c. Koordinator
 - Bidang Penjaminan Mutu dan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi
 - o Sub Koordinator Penyelenggaran Peningkatan Kompetensi PTK
 - o Sub Koordinator Evaluasi Peningkatan Kompetensi PTK
 - o Sub Koordinator Penjaminan Mutu

- Bidang Program, Data, Inovasi, dan Kemitraan
 - o Sub Koordinator Program dan Data
 - o Sub Koordinator Inovasi dan TIK
 - o Sub Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan
- d. Pengembangan
 - o Agribisnis Tanaman dan Kehutanan
 - o Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - o Agribisnis Perikanan
 - o Agroindustri dan Teknik Kimia
 - o Sains Terapan, Otomasi Pertanian dan Pengajaran Umum
- e. Kelompok Kerja Akselerasi
- f. Jabatan Fungsional
 - Widyaiswara
 - Pengembang Teknologi Pembelajaran
 - Widyaprada
 - Pranata Humas
- g. Pelaksana

(2) Analisis Jabatan

Dinamika Organisasi seiring dengan perubahan regulasi menghendaki adanya penyesuaian posisi dan pekerjaannya. Melalui analisis jabatan akan ditemukan kebutuhan (*needs*) organisasi yang saat ini betul-betul dibutuhkan dalam mendukung penguatan kinerjanya.

(3) Staffing

Pembagian SDM agar dapat ditempatkan sesuai dengan minat, keinginan dan kompetensinya mutlak menjadi hal yang sangat penting. Dengan rotasi dan juga seleksi yang tepat tentu akan mengakibatkan kekuatan organisasi menjadi kuat dan akselerasinya meningkat.

(4) Pembagian Tugas dan Wewenang (*job description*)

Tugas pokok dan fungsi masing-masing staf atau SDM merupakan hal yang mendasar dalam menciptakan harmonisasi kerja seluruh warga. Masing-masing SDM mampu memahami sehingga dapat langsung bertanggungjawab terhadap tugas, peran dan fungsinya dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kelembagaan secara masif.

(5) Sistem Pengawasan Internal

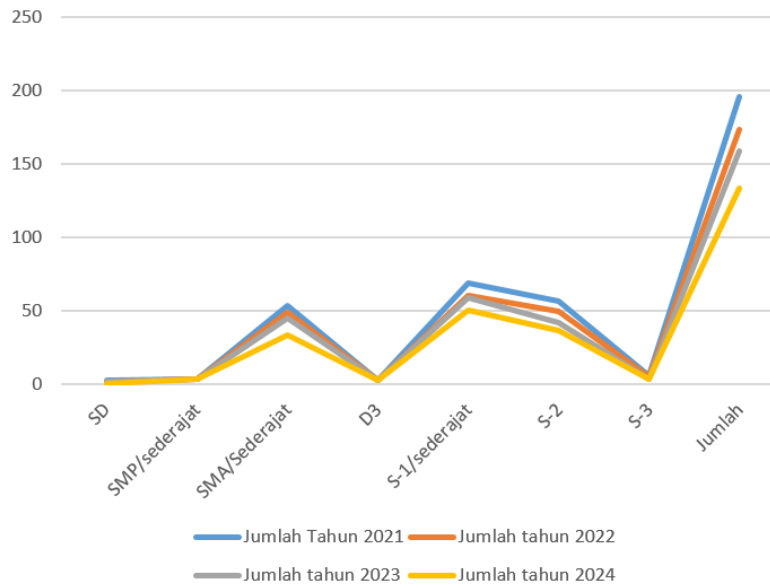
Selain sebagai tim yang bekerjasama dengan seluruh komponen struktur lainnya dalam mengembangkan kualitas kinerja BBPPMPV Pertanian, SPI juga diharapkan mampu menjadi faktor penentu terjaminnya mutu layanan lembaga.

Berbagai program pengembangan kompetensi SDM perlu dilaksanakan setiap tahun untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan SDM yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan Lembaga.

Tabel 3.2. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Tahun 2021	Jumlah tahun 2022	Jumlah tahun 2023	Jumlah tahun 2024
SD	3	2	2	1
SMP/ sederajat	4	4	4	4
SMA/ Sederajat	54	49	45	34
D3	3	3	3	3
S-1/ sederajat	69	61	59	51
S-2	57	50	42	37
S-3	6	5	4	4
Jumlah	196	174	159	134

Grafik 3.1. Komposisi SDM Berdasarkan jenjang Pendidikan



Tabel 3.3. Komposisi Jabatan di BBPPMPV Pertanian Periode 1 November 2022

Jabatan	Jumlah
	1
Kabag Taus	1
• Widyaiswara	46
• PTP	16
• Widyaprada	2
• Pranata Humas	1
• Pelaksana	108
Jumlah	175

3.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai unit pelaksana teknis yang mengemban amanat dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan,

BBPPMPV Pertanian berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi.

Selain itu, BBPPMPV Pertanian juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi enam area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (change management) merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi mencapai kinerja yang lebih baik. Perubahan dimaksud dapat meliputi: struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Pengelolaan perubahan dalam organisasi bukanlah proses sederhana, kerap kali menemukan resistensi. Untuk memperlancar perubahan dalam organisasi diperlukan transparansi proses, komunikasi dan keterlibatan semua pihak.

Program WBBM pada area manajemen bermaksud merubah situasi sekarang ke arah situasi masa depan yang lebih baik, khususnya layanan prima kepada para pelanggan. Perubahan dimaksud berada pada seluruh komponen organisasi dan menyeluruh dalam wilayah manajerial maupun operasional meliputi penguatan tim kerja, penyusunan program kerja dan perubahan mindset atau budaya kerja

2. Penataan Tatalaksana

Penataan area Tata Laksana diharapkan mendukung reformasi birokrasi khususnya penciptaan layanan organisasi yang cepat, valid, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan strategi dalam mendukung penataan ketatalaksanaan organisasi meliputi Prosedur Operasional Standar (POS) yang efektif, pemanfaatan e-office dalam pengelolaan organisasi dan Keterbukaan dalam informasi public

3. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Profesionalisme SDM Aparatur berpengaruh pada kualitas layanan organisasi. Penguatan sistem manajemen SDM Aparatur yang dilaksanakan organisasi meliputi : perencanaan, penilaian kinerja, penggajian/ remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan standar kompetensi, serta administrasi kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi pegawai internal dan rotasi, Penyusunan naskah akademik guna penyusunan kompetensi pegawai, pengembangan pegawai, promosi jabatan, penetapan kinerja individu, penegakan disiplin/kode etik melalui peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ASN dan sistim yang digunakan dalam kepegawaian.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tata Kelola yang baik (*Good Governnance*) dan Pemerintah yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*) diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN, melalui keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari area Reformasi Birokrasi karena memiliki kontribusi untuk menjamin ketercapaian tujuan dan mutu program. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya Kemendikbud adalah Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Reformasi birokrasi melalui area penguatan pengawasan bermaksud merubah situasi pengawasan sekarang ke arah pengawasan masa depan yang lebih baik. Perubahan dimaksud berada pada fungsi Satuan Pengawas Internal dan menyeluruh pada fungsi setiap komponen organisasi dalam wilayah manajerial maupun operasional, meliputi penyusunan tim kerja UPG, mengelola pengaduan masyarakat, WBS dan Benturan Kepentingan, Pengawasan Hasil Penyusunan Peta Resiko, LHKPN, LHKASN, Evaluasi dan Tindak lanjut Program kerja Area Penguatan pengawasan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Layanan publik yang dilaksanakan BBPPMPV Pertanian dilakukan untuk memberikan pelayanan optimal dan menyeluruh, meliputi 8 Standar Pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur

Standar Pelayanan di lingkungan BBPPMPV Pertanian, ada 8 :

1. Kerjasama
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Tatap Muka dan Daring)
3. Penyediaan SDM
4. Magang
5. Praktek Kerja Industri
6. Penggunaan Fasilitas
7. Kunjungan
8. Layanan Perpustakaan

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud serta revitalisasi pendidikan vokasi untuk mencapai Visi Indonesia 2024 dan RPJMN 2020 – 2024, BBPPMPV Pertanian menetapkan tujuan strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari pelaksanaan program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud, setiap tujuan strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 4.1.
Target Kinerja Sasaran Strategis BBPPMPV Pertanian Periode Renstra 2020 – 2024

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan (2020)						
IKK	orang	3.610	-	-	-	-
SK 1. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi berbasis kerja sama industri (2021)						
Jumlah guru kejuruan yang mengikuti <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> berstandar	Orang	-	640	686	734	786
IKK 2. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri	Orang	-	330	110	110	110
IKK 3. Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>	Model	-	20	22	24	26
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi (Tahun 2022 – 2024)						
IKK 1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	-	-	1.241	1.380	1.518
IKK 2. Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Orang	-	-	319	319	319

IKK 3. Jumlah model pembelajaran vokasi yangdikembangkan dengan mitra dunia kerja	Model	-	-	2	2	3
SK 2. Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi (Tahun 2022 – 2024)						
IKK 7. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	A	A	A	A

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 8. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Predikat	93	93	93	95	96

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan BBPPMPV Pertanian dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:

- a. Periode tahun 2020; dan
- b. Periode tahun 2021 – 2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2020

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)
1	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	51.255.473.000,00

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024 mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2021

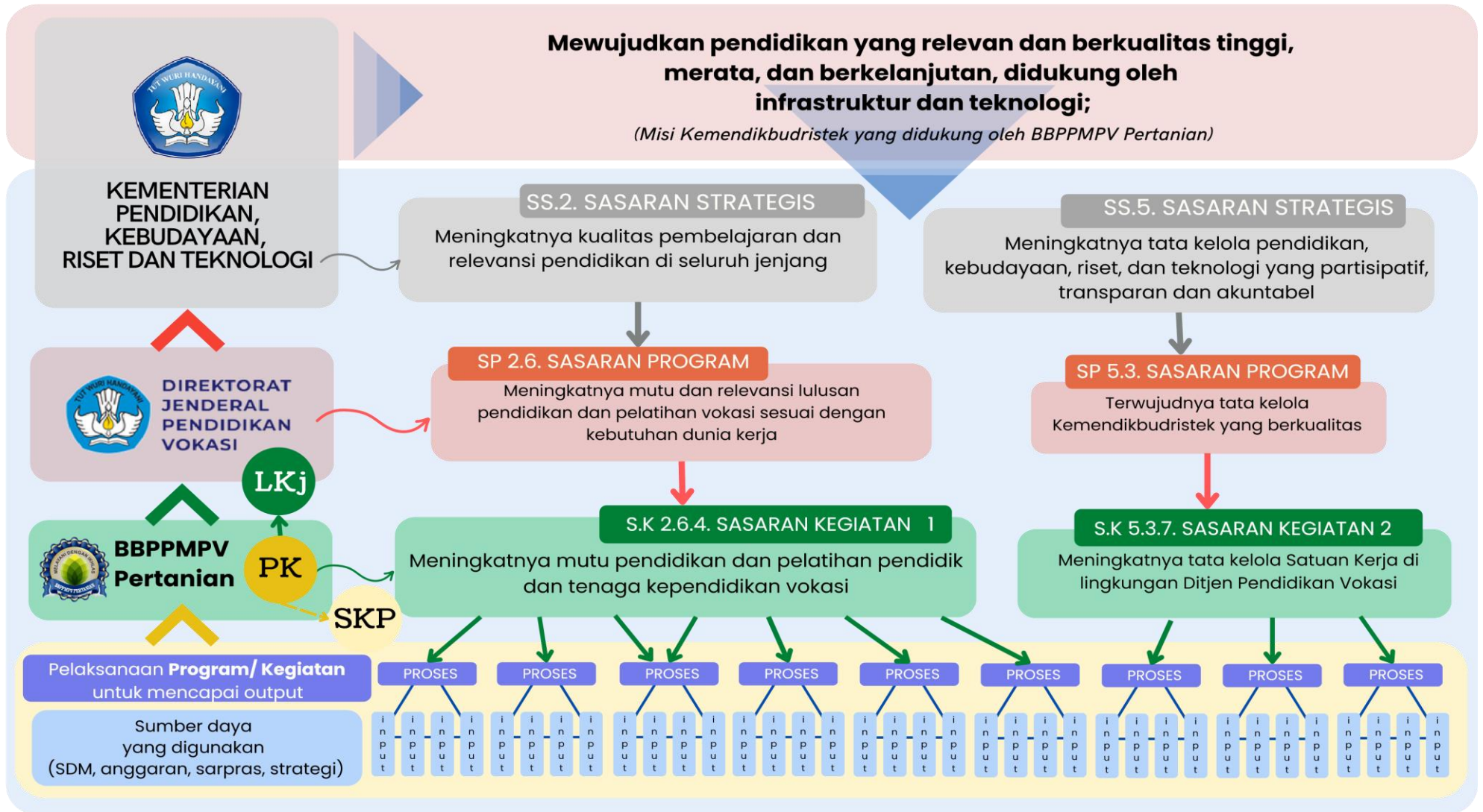
No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	20.894.752.000
2.	Program Dukungan Manajemen	42.848.635.000
	JUMLAH	63.743.387.000,00

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BBPPMPV Pertanian 2024

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp.)			
		2022	2023	2024	JUMLAH
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	22.221.654.000	30.674.962.000	36.809.954.000	89.706570.400
2.	Program Dukungan Manajemen	43.886.527.000	55.373.145.000	66.4477.774.000	165.707.446.000
	JUMLAH	66.108.181.000	86.048.107.000	103.257.728.400	255.414.016.400

LAMPIRAN

KERANGKA LOGIS / POHON KINERJA BBPPMPV PERTANIAN



DEFINISI OPERASIONAL

PROGRAM	:	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
SP	:	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi
IKP 2.6.4	:	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas,

Definisi:

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

Lingkup satuan pendidikan vokasi adalah SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP bidang vokasional.

Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila pembelajaran melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar, yaitu guru, siswa dan interaksi antara keduanya, serta didukung oleh berbagai unsur- unsur pembelajaran, meliputi kurikulum yang sudah diselaraskan dengan dunia kerja, metode pembelajaran (PBL, Tefa, CBL, CML), dan sarana prasarana yang menunjang, termasuk platform digital.

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Kerja sama Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia kerja meliputi;

1. Satuan Pendidikan Vokasi yang belum pernah melakukan kerja sama dengan dunia kerja;

2. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah bermitra dengan dunia kerja, tapi perlu diperluas jumlah mitranya;
3. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah melaksanakan kerja sama, dan perlu ditindak lanjuti dengan pola kemitraan berkelanjutan dalam bentuk program kegiatan nyata, yang dapat mendorong terwujudnya link & match

Metode Perhitungan:

$$I = \frac{A + B + C}{D} \times 100\%$$

Keterangan:

I= Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja

A= Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas

B= Jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengimplementasikan standar mutu pendidikan vokasi (8 + i)

C= Jumlah satuan pendidikan vokasi yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja

D= Total jumlah satuan pendidikan vokasi

Satuan : Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Dit. Mitras DUDI dan **Balai Besar Vokasi,** Ditjen Pendidikan Vokasi

Sumber Data : Dapodik, Tracer Study, Laporan Internal

SK	: Meningkatkan mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
IKK 2.6.4.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti

Definisi

Lingkup pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas:

1. pendidik satuan pendidikan vokasi adalah guru SMK, Dosen PTV, dan Instruktur Kursus dan Pelatihan; dan
2. Tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi adalah Pimpinan PTV, Kepala Sekolah, Pengelola LKP, pengawas, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan vokasi (SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP).

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi adalah program peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan berfokus pada keahlian yang diajarkan di satuan pendidikan vokasi.

Peserta program peningkatan kapasitas adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari satuan pendidikan vokasi baik negeri maupun swasta.

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling*.

- a) Pelatihan *Upskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.
- b) Pelatihan *Reskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya.

Program peningkatan kapasitas tersebut dilakukan oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerja sama dengan Dunia Kerja dan/atau Lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/ kerja. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas tersebut mengacu pada juknis atau Perdirjen terkait.

Metode Perhitungan

$$I = A + B + C + D$$

Keterangan:

I= Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas dan penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja

A= Guru yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja

B= Guru, Kepala Sekolah, pengawas, teknisi, laboran, instruktur dan tenaga administrasi lainnya yang mengikuti *Upskilling* dan *Reskilling* Berstandar Industri

C= Dosen yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Berbasis Kerja sama Industri

D= Instruktur dan pengelola kursus dan pelatihan yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan

Satuan : orang

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : **Balai Besar Vokasi**

Sumber Data : Laporan Internal Polarisasi

Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK	: Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
IKK 2.6.4.3	: Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Definisi	
<p>Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.</p> <p>Lingkup satuan pendidikan vokasi yang akan dipetakan mutunya adalah SMK dan LKP (bidang vokasional).</p> <p>LKP bidang vokasional adalah LKP yang menyiapkan peserta didiknya menguasai ketrampilan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.</p> <p>Mutu Pendidikan Vokasi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya), Kepmendikbudristek No. 165/M/2021 tentang Program SMK Pusat Keunggulan, dan peraturan serta kebijakan terkait (<i>Link and Match</i>/Keterlibatan dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi 8 + i):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum disusun Bersama, termasuk penguatan aspek softskills dan karakter kekerjaan untuk melengkapi aspek hardskills yang sesuai kebutuhan dunia kerja; 2. Pembelajaran berbasis project riil dari dunia kerja (PBL), untuk memastikan hardskills akan disertai softskills dan karakter yang kuat; 3. Jumlah dan peran guru/dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja ditingkatkan secara signifikan (sampai minimal mencapai 50 jam/semester/program studi/program keahlian); 4. Magang atau Praktik Kerja di dunia kerja minimal 1 semester; 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan guru/dosen/instruktur); 6. Guru/Dosen/instruktur secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja; 7. Riset terapan mendukung teaching factory/teaching industry yang bermula dari kasus atau kebutuhan; 8. Komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja; 9. Berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja, antara lain: 10. Beasiswa dan/atau ikatan dinas; 11. Donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, atau dalam bentuk lainnya; dan lain sebagainya. <p>Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi.</p> <p>Tujuan pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah untuk memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan vokasi.</p> <p>Metode Perhitungan</p> $I = A + B$ <p>Keterangan: I = Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan A = jumlah SMK dengan mutu yang</p>

Definisi

terpetakan

B = jumlah LKP (bidang vokasional) dengan mutu yang terpetakan

Satuan : Lembaga

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana : **Balai Besar Vokasi**

Sumber Data : Laporan Internal

Polarisasi Indikator: Maksimal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK	: Meningkatkan mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
IKK 2.6.4.3	: Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Definisi	
<p>Model adalah representatif yang akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan pijakan yang terpresentasikan dari model itu. Model juga dapat diartikan sebagai visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga model dapat berwujud sebagai: (1) tipe atau desain, (2) deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi, (3) deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner. Di samping itu juga model memiliki tujuan yang hendak dicapai dan memiliki prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan.</p> <p>Pengembangan model pendidikan vokasi adalah proses penelitian terapan yang merancang tipe, desain, bentuk deskripsi, sistem kegiatan, yang diproses dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah dan hasilnya dapat mewakili kondisi nyata yang diharapkan oleh kelompok sasaran dan mampu memecahkan masalah bidang pendidikan vokasi. Untuk memperoleh hasil seperti itu, model program atau pembelajaran divalidasi oleh ahli dan praktisi dan diujicobakan sehingga model yang dihasilkan efektif, efisien, praktis dan menarik dalam memecahkan masalah atau dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja. Model yang dikembangkan dapat berbentuk model adaptasi dan model baru. Model adaptasi merupakan pengembangan model yang telah ada. Model baru merupakan model yang dikembangkan sendiri oleh pengembang.</p>	<p>Kriteria model/inovasi pembelajaran yang dimaksud antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Implementasi link and match Pendidikan Vokasi; 2. Memberikan solusi kemitraan dan penyesuaian Satuan Pendidikan Vokasi (SMK/ PTV /LKP) dengan mitra dunia kerja; minimal 1 semester; 3. Memiliki dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan vokasi; dan 4. Memiliki kemudahan direplikasi oleh Satuan Pendidikan Vokasi. <p>Model/inovasi pembelajaran dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model Inovasi Pembelajaran Berbasis Proyek. Pembelajaran ini berorientasi pada proyek yang ada di industri dan disusun serta direncanakan bersama industri; 2. Pengembangan Teaching Factory. Model ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teaching factory di SMK; 3. Pengembangan Produk Kreatif. Model inovasi ini dilaksanakan untuk mengembangkan pembelajaran di SMK; 4. Pengembangan model diklat terapan bagi dosen/guru/instruktur vokasi; 5. Pengembangan diklat baru yang selaras dengan mitra dunia kerja; 6. MOOC (Massive Online Open Courses) untuk diklat bagi SDM pendidikan vokasi; 7. Pengembangan LMS (Learning Management System) pada SMK;

Definisi

8. Model Pembelajaran Placement Berbasis Project. Placement adalah sebuah model pembelajaran kolaboratif yang berkelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran; dan lain-lain.

Pelaksanaan program pengembangan model pembelajaran vokasi tersebut mengacu pada juknis atau perdirjen terkait.

Metode Perhitungan

I = Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Satuan : Model

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Balai Besar Vokasi

Sumber Data : Laporan Internal

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data: Tahunan

SK	: Meningkatkan mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
IKK 5.3.7.1	: Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Definis :

Berdasar Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
Total	100%

Metode Penghitungan:

Penilaian SAKIP BBPPMPV Pertanian ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap implementasi SAKIP melalui Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

Satuan : Predikat

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi SAKIP